

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang Masalah

Kecurangan akuntansi seringkali terjadi. Kecurangan yang terjadi beraneka ragam mulai dari bentuk manipulasi hingga penyalahgunaan aset. Hal ini menyebabkan terjadinya kerugian bagi suatu Lembaga organisasi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menyatakan lebih dari seribu bahkan di seluruh dunia termasuk Indonesia setiap tahunnya sebesar 5% mengalami kehilangan pendapatannya yang diakibatkan oleh kecurangan akuntansi tersebut. Salah satunya ialah korupsi, penggelapan aset dan kecurangan laporan keuangan (Prandyani, 2014). Berdasarkan ACFE, Indonesia menduduki peringkat ke dua kasus Fraud se-ASEAN (ACFE, 2021).

Berdasarkan data BPKP di tahun 2020 menyatakan sebanyak 86% terjadi kasus kecurangan yang berbentuk korupsi, penggelapan aset dan kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya, lebih spesifik di Provinsi Riau juga terjadi kecurangan atau *fraud* dilakukan oleh KAP Sinuraya dengan *fraud* sebesar 10 Milyar. Kasus *fraud* tersebut dilakukan pada tahun 2020 dikarenakan pemenuhan kebutuhan pribadi sehingga laporan yang diaudit tidak sesuai. Akhirnya kasus ini telah ditangani secara hukum. Kemudian berdasarkan observasi awal juga terjadi kasus kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh SKPD Kabupaten Indragiri Hilir melakukan penggelapan dana sebesar 2 Milyar. *Fraud* ini dilakukan oleh pimpinan SKPD dan kejadian tersebut terjadi pada tahun 2020. Motif pelaku melakukan *fraud* tersebut karena merasa kurang diawasi dan dikarenakan adanya kesempatan. Hal ini menyebabkan perlunya tindakan pengawasan dan pemecahan masalah. Kecenderungan kecurangan akuntansi bisa disebabkan oleh beberapa faktor (BPK, 2020).

Salah satu faktornya yaitu asimetri informasi. Hal ini terjadi akibat ketidakseimbangan antara informasi yang dimiliki oleh pemerintah serta

informasi yang diperoleh publik. Jika tingkat asimetrinya dalam informasi ini lebih tinggi terjadi pada masyarakat maka bisa saja terjadi Tindakan ilegal yang dilakukan sehingga akan menjadikan kecurangan akuntansi (Rachmanta, 2014). Asimetri informasi yang terjadi cukup banyak di Indonesia seperti Lembaga daerah maupun Lembaga swasta yang sering melakukan kecurangan akuntansi akibat informasi yang dibagikan tidak diketahui oleh semua pihak. Salah satu pihak saja yang mengetahui informasi tersebut sehingga adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan data BPK melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2020-2021 terdapat beberapa temuan kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp 18,60 Miliar yang terjadi pada Pemkab Indragiri Hilir, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan antara lain atas :

- (1) Biaya langsung personel tenaga ahli pengadaan manajemen konstruksi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada.
- (2) Pembayaran termin pekerjaan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, pembayaran atas penambahan pekerjaan dengan harga satuan melebihi 110% HPS (harga timpang), serta kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan koreksi harga satuan beton pada pekerjaan pembangunan rehabilitasi RSUD Puri Husada (DAK Penugasan).
- (3) Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi pada pekerjaan pembangunan ruang operasi.

Faktor selanjutnya ialah kesesuaian kompensasi. Kesesuaian kompensasi memberikan insentif atau motivasi utama bagi seorang pegawai untuk bekerja. Kompensasi mencakup semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pekerja dan diterima atau dinikmati oleh pekerja, baik secara langsung, rutin maupun tidak langsung. Kompensasi dalam arti luas selain terdiri dari gaji dan upah, juga dapat berupa fasilitas perumahan, fasilitas kendaraan, seragam, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan makan dan lain-lain yang dapat dinilai dengan uang dan cenderung diterima oleh pegawai secara berkala (Arfan, 2017).

Kompensasi akan memberikan dorongan bagi pegawai untuk bekerja secara maksimal, berprestasi dan mencapai target kerja yang telah ditentukan. Ketika seorang pegawai merasa puas dengan kompensasi yang telah diterimanya, baik dalam bentuk finansial seperti gaji, bonus atau tunjangan atau non finansial dalam bentuk hadiah, penghargaan atau promosi (Mulyadi, 2015), pegawai tersebut akan berusaha untuk meningkatkan kecurangannya. Selain itu, kompensasi juga dapat mencegah perilaku kecurangan akuntansi dikarenakan pegawai telah merasa puas atas kompensasi yang diberikan.

Selanjutnya, ketaatan aturan akuntansi. Standar pelaporan keuangan akuntansi dalam lingkup pemerintahan diatur dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Akuntansi Pemerintah Daerah mengacu pada SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. SAPD (Standar Akuntansi Pemerintah Daerah) merupakan rangkaian sistematis dari prosedur penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan SKPD. SAPD ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. SAPD yang digunakan saat ini berbasis akrual yang mana laporan keuangan yang harus dibuat ada tujuh, yaitu:

- (1) Neraca
- (2) Laporan Realisasi Anggaran
- (3) Laporan Operasional
- (4) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- (5) Laporan Perubahan Ekuitas
- (6) Laporan Arus Kas
- (7) Catatan Atas Laporan Keuangan

Pihak akuntansi harus memahami standar akuntansi diatas karena peran utama dari standar akuntansi adalah untuk membawa universalitas dalam

catatan keuangan dan pembukuan. Organisasi pemerintah, perusahaan swasta, dan setiap badan akuntansi lainnya harus mengikuti prosedur akuntansi yang sama (Kurniawan, 2014).

Standar akuntansi dikembangkan untuk memastikan sistem yang transparan dalam suatu organisasi. Prinsip dan prosedur akuntansi dibuat dengan tujuan agar informasi dapat terbuka bagi pengamat. Standar membatasi organisasi untuk menggunakan akuntansi yang cermat untuk memindahkan barang-barang, melakukan penggelapan dana ataupun kecurangan akuntansi (Suwardjono, 2017). Sehingga diperlukan tingkat ketaatan terhadap aturan akuntansi yang berlaku agar dapat menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi di lingkungan SKPD Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan permasalahan diatas menyebabkan pentingnya asimetri informasi, kesesuaian kompensasi dan ketaatan aturan akuntansi untuk mencegah dari adanya tindak kecurangan akuntansi. Sesuai dengan permasalahan tersebut maka peneliti menentukan judul penelitian yaitu : **“PENGARUH ASIMETRI INFORMASI, KESESUAIAN KOMPENSASI DAN KETAATAN ATURAN AKUNTANSI TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Indragiri Hilir)”**

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ekawati (2020) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Denpasar dengan variabel independen yaitu Sistem Pengendalian Internal, Asimetri Infomasi, Kesesuaian Kompensasi, dan Ketaatan Aturan Akuntansi menemukan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif dan 3 variabel independen lainnya berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi di OPD Denpasar. Hasibuan (2020) penelitian dilakukan di Tapanuli Selatan Sumatera Utara, menemukan bahwa pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif signifikan dan kesesuaian kompensasi berpengaruh positif tidak signifikan

terhadap Kecurangan Akuntansi. Rasidik (2018) dengan variabel independennya yaitu asimetri informasi, moralitas individu, kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal secara bersamaan menemukan indikasi kecurangan akuntansi pada Daihatsu Samarinda. Saud (2021) menemukan bahwa pengendalian internal, tekanan keuangan dan kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali terkait dengan variabel asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di daerah yang lain yaitu di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya peneliti ingin mendapatkan bukti empiris bagaimana Sistem Informasi Akuntansi memoderasi hubungan antara variabel asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, kecenderungan kecurangan akuntansi dengan variabel kecurangan akuntansi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan penelitian maka tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan Akuntansi pada SKPD Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan Akuntansi pada SKPD Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan Akuntansi pada SKPD Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai hubungan moderasi antara sistem informasi akuntansi dengan asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel dan hasil penelitian kuantitatif akan disajikan dalam bentuk data statistik (Sugiyono, 2016). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, dan ketaatan aturan akuntansi, dengan variabel dependen yaitu kecurangan akuntansi (*fraud*). Data diperoleh melalui kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait indikator penilaian variabel penelitian yang kemudian kuesioner tersebut diberikan kepada pegawai pemerintahan di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir dengan kriteria-kriteria responden yang telah ditetapkan.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir. Namun, kesesuaian kompensasi dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Selanjutnya Sistem Informasi Akuntansi dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh antara variabel asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi dengan variabel kecurangan akuntansi.

1.6 Kontribusi Riset

a. Kontribusi Teori

Penelitian ini dapat memberikan pandangan dan pengertian bagi semua Lembaga organisasi untuk memperhatikan kecenderungan kecurangan akuntansi melalui asimetri informasi, kesesuaian kompensasi dan kepatuhan terhadap aturan akuntansi.

b. Kontribusi Kebijakan/Kontribusi dalam hal pengujian empiris

Secara empiris penelitian ini memberikan pertimbangan untuk pihak SKPD Kabupaten Indragiri Hilir supaya memperhatikan dan meningkatkan pengawasan terhadap kecurangan akuntansi yang terjadi serta melakukan pencegahannya.

1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab 1 ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian. Secara singkat bab ini menjelaskan permasalahan yang mendasari penelitian skripsi ini yang terkait dengan pengaruh asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori, penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian dan kerangka berpikir dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori *Fraud Triangle*.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab 3 menjelaskan tentang variabel-variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup gambaran umum terkait variabel penelitian, deskripsi statistik, hasil pengolahan data, pengujian hipotesis dan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh.

BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari ringkasan secara umum terkait hasil penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran dari hasil penelitian yang telah diteliti.